

BAB III
DINAMIKA SOSIAL DAN EKONOMI DI BENGKULU
ERA KEPEMIMPINAN GUBERNUR SOEPRAPTO
TAHUN 1978 -1989

A. Kebijakan Sentralisasi Orde Baru

Pada masa Orde Baru (1966–1998), Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terpusat. Seluruh kendali pembangunan berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta, sementara daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Kondisi ini juga berlaku di Bengkulu, di mana Gubernur Soeprapto (1979–1989) lebih banyak bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan program nasional. Hal ini menjadikan arah pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh agenda nasional, khususnya program stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas utama Orde Baru.⁷¹

Kepemimpinan Suprpto sebagai Gubernur Bengkulu berlangsung pada masa pelaksanaan Repelita III (1979–1984) dan Repelita IV (1984–1989), yaitu periode pembangunan nasional Orde Baru yang menekankan pada pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan utama Repelita III ialah melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang mantap, memperkuat stabilitas nasional, serta meningkatkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah.

⁷¹ M. Dawam Rahardjo, *Orde Baru dan Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 45.

Program ini juga menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian dan industri, serta perluasan kesempatan kerja. Sementara itu, Repelita IV menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemerataan hasil pembangunan di segala bidang.⁷²

Dalam konteks Bengkulu, pelaksanaan Repelita III di bawah kepemimpinan Suprpto tercermin melalui berbagai pembangunan fisik dan infrastruktur, seperti pembangunan jalan lintas Bengkulu-Lampung, pembangunan sejumlah jembatan penghubung antarwilayah, serta pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan. Di bidang pendidikan, salah satu pencapaian penting adalah pembangunan Universitas Bengkulu (UNIB) yang berfungsi sebagai penunjang kemajuan pendidikan tinggi di Provinsi Bengkulu. Adapun Repelita IV menjadi lanjutan dari kebijakan sebelumnya, dengan fokus pada penguatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan.⁷³

Dari perspektif sosial, pola pembangunan *top-down* pada masa Orde Baru membentuk masyarakat yang cenderung pasif dan bergantung pada pemerintah. Minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan menurunkan rasa memiliki terhadap program pembangunan, sehingga efektivitas

⁷² Alfian, *Politik dan Pemerintahan Orde Baru* (Jakarta: PT Gramedia, 1993), hlm. 77.

⁷³ Bappenas, *Repelita III: Rencana Pembangunan Lima Tahun 1979/80–1983/84* (Jakarta: Bappenas, 1979), hlm. 12–15.

pelaksanaannya tidak selalu sesuai harapan. Meski demikian, stabilitas politik dan kontrol birokrasi yang ketat pada masa Orde Baru turut menciptakan kondisi kondusif untuk pembangunan fisik dalam skala besar, misalnya pembangunan jalan lintas Sumatera dan pengembangan kawasan transmigrasi di Bengkulu.⁷⁴

B. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pada masa kepemimpinan Gubernur Soeprapto di Provinsi Bengkulu. Hal ini didorong oleh kondisi geografis Bengkulu yang relatif terisolasi, diapit oleh Samudera Hindia di sebelah barat dan Pegunungan Bukit Barisan di bagian timur. Keterbatasan akses transportasi serta minimnya sarana dan prasarana umum menyebabkan pergerakan manusia maupun barang berjalan lambat. Dalam konteks itu, pembangunan jalan penghubung antar kabupaten, jembatan, serta pengembangan pelabuhan menjadi strategi kunci untuk mengurangi keterisolasian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.⁷⁵

Kebijakan pembangunan tersebut dilaksanakan dalam kerangka Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang dicanangkan pemerintah pusat. Di Bengkulu, proyek pembangunan jalan difokuskan pada peningkatan akses dari Kota Bengkulu menuju kabupaten-kabupaten di pedalaman, seperti

⁷⁴ Riza Alfian, "Pembangunan Daerah dalam Bayang-Bayang Sentralisasi Orde Baru," *Jurnal Sejarah dan Budaya* Vol. 5, No. 2 (2014), hlm. 48.

⁷⁵ Laporan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dalam konteks daerah Bengkulu, lihat *Departemen Penerangan RI, Pembangunan Daerah dalam Repelita III* (Jakarta: Depen RI, 1981), hlm. 45.

Rejang Lebong, Kaur, dan Mukomuko. Jalan Lintas Barat Sumatra yang melintasi Bengkulu juga diperkuat untuk memperlancar mobilitas barang dan manusia. Hasil pertanian unggulan daerah, seperti kopi, karet, dan lada, semakin mudah dipasarkan ke luar daerah berkat perbaikan jaringan transportasi ini.⁷⁶

Selain pembangunan jalan, Pelabuhan Pulau Baai di pesisir Kota Bengkulu juga menjadi salah satu proyek penting. Sebelumnya, aktivitas perdagangan luar daerah Bengkulu masih bergantung pada pelabuhan di provinsi tetangga. Dengan adanya pengembangan Pulau Baai, Bengkulu memperoleh jalur logistik yang lebih mandiri dan mampu terhubung langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar nasional. Hal ini mendorong integrasi ekonomi daerah ke dalam sistem perdagangan nasional.⁷⁷

Upaya lain ditunjukkan melalui pembangunan jalan dan jembatan. Berita Yudha pada 3 September 1983 melaporkan bahwa Gubernur Soeprapto meresmikan 25 jembatan permanen di Bengkulu, menggantikan jembatan gantung yang sebelumnya rawan rusak. Ia juga menekankan keberhasilan pembangunan jalan dari Kota Bengkulu menuju Manna, yang sebelumnya ditempuh dengan bermalam karena harus menunggu surutnya sungai, kini dapat dicapai dalam waktu tiga setengah jam. Salah satu jembatan penting yang dibangun ulang adalah Jembatan Lais,

⁷⁶ Laporan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dalam konteks daerah Bengkulu, lihat *Departemen Penerangan RI, Pembangunan Daerah dalam Repelita III* (Jakarta: Depen RI, 1981), hlm 47-49.

⁷⁷ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Sejarah dan Perkembangan Pelabuhan Pulau Baai* (Bengkulu: Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, 1985), hlm. 12.

yang peninggalan Belanda namun diperkuat kembali untuk mendukung akses transportasi modern.⁷⁸

Dalam ranah kebijakan formal, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah proyek strategis. Berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor 517 Tahun 1984, ditetapkan pemenang lelang pembangunan jalan provinsi jurusan Bengkulu–batas Lampung, khususnya pada ruas Km 147–180 PA, dengan nilai borongan sebesar Rp248,4 juta.⁷⁹ Tahun berikutnya, melalui SK Nomor 190 Tahun 1985, pemerintah melaksanakan proyek perbaikan Jembatan Air Ketahun.⁸⁰ Kebijakan ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dasar.

Tidak hanya jalan dan jembatan, pelabuhan Pulau Baai juga menjadi perhatian khusus. Melalui SK Nomor 569 Tahun 1984, dibentuk Panitia Uji Coba Pelabuhan Pulau Baai yang bertugas menyiapkan pelaksanaan upacara peresmian uji coba.⁸¹ Pembentukan panitia ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kesiapan operasional pelabuhan sebagai simpul penting perdagangan dan transportasi laut di Bengkulu.

Tidak hanya transportasi, pembangunan infrastruktur sosial juga mulai dijalankan. Jaringan listrik diperluas oleh PLN ke sejumlah wilayah meski belum merata, sistem irigasi dan

⁷⁸ “Pembangunan Jalan dan Jembatan Terus Ditingkatkan,” *Berita Yudha*, 3 September 1983, hlm. 4.

⁷⁹ SK Gubernur Bengkulu Nomor 517 Tahun 1984 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Jembatan Air Manna.

⁸⁰ SK Gubernur Bengkulu Nomor 190 Tahun 1985 tentang Perbaikan Jembatan Air Ketahun dan Pembangunan Bronjong Jalan Provinsi Bengkulu.

⁸¹ SK Gubernur Bengkulu Nomor 569 Tahun 1984 tentang Pembentukan Panitia Uji Coba Pelabuhan Pulau Baai.

bendungan kecil dibangun untuk mendukung sektor pertanian, sementara jaringan komunikasi mulai dikembangkan. Dampak sosialnya cukup besar: desa-desa yang sebelumnya terisolasi dapat mengakses pasar, layanan pendidikan, maupun kesehatan. Namun, di sisi lain muncul pula tantangan baru berupa konflik lahan, ketimpangan antar wilayah, hingga kerusakan lingkungan akibat pembukaan jalan dan lahan berskala besar.⁸²

Komitmen Gubernur Soeprapto dalam pembangunan jaringan komunikasi terekam dalam pemberitaan Suara Karya edisi 18 Maret 1980. Dalam wawancara dengan harian tersebut, ia menegaskan pentingnya pembangunan jaringan telekomunikasi nasional agar Bengkulu dapat terhubung dengan daerah lain dari Sabang sampai Merauke.⁸³ Pernyataan ini menunjukkan upaya serius pemerintah daerah untuk tidak hanya memperkuat konektivitas fisik, tetapi juga memperbaiki keterhubungan informasi dan komunikasi. Namun dikarenakan keterbatasan sumber, penulis belum menemukan bukti konkret terkait pembangunan jaringan telekomunikasi di Bengkulu era pemerintahan Gubernur Sueprapto.

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan infrastruktur di era Gubernur Soeprapto berperan penting dalam mengurangi keterisolasian Bengkulu dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah. Meski menghadapi berbagai

⁸² Bappeda Provinsi Bengkulu, *Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah 1979–1984* (Bengkulu: Bappeda, 1984), hlm. 30–32.

⁸³ “Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Nasional,” *Suara Karya*, 18 Maret 1980, hlm. 1.

keterbatasan, langkah-langkah tersebut menjadi fondasi awal bagi transformasi Bengkulu dari daerah yang terpinggirkan secara geografis menjadi wilayah yang lebih terintegrasi dengan arus pembangunan nasional.

Jika dikaitkan dengan teori dinamika sosial menurut Kusnadi, pembangunan yang dilakukan pada masa ini mencerminkan adanya perubahan sosial yang bersifat struktural, di mana interaksi masyarakat Bengkulu mulai bergeser dari pola tradisional menuju pola yang lebih modern dan produktif. Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan turut memperluas mobilitas penduduk, mempercepat arus informasi, serta menumbuhkan aktivitas ekonomi baru di berbagai sektor. Hal ini terlihat sebagaimana tertuang dalam surat kabar Berita Yudha terbitan 3 September 1983, dengan judul Pembangunan Jalan dan Jembatan Terus Ditingkatkan. Di dalam surat kabar tersebut disebutkan Menteri Pekerja Umum telah meresmikan 25 jembatan di Provinsi Bengkulu demi terjalannya mobilitas yang lebih stabil. Dengan demikian, kebijakan pembangunan pada masa Soeprapto tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong terbentuknya dinamika sosial berupa perubahan nilai, perilaku, dan pola hubungan sosial masyarakat Bengkulu yang semakin adaptif terhadap modernisasi.

C. Pengembangan Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian Bengkulu pada masa kepemimpinan Gubernur Soeprapto (1978–1989). Karakteristik geografis

Bengkulu yang memiliki tanah subur, iklim tropis basah, serta ketersediaan lahan luas menjadi modal penting dalam pengembangan komoditas pangan dan perkebunan. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, tetapi juga untuk mendukung program swasembada pangan nasional sekaligus mendorong ekspor komoditas unggulan daerah.⁸⁴

Kebijakan pembangunan tersebut sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) III dan IV yang dijalankan pemerintah pusat pada masa Orde Baru. Dalam REPELITA III (1979–1984), pemerintah menitikberatkan pada upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan produksi pangan melalui program intensifikasi pertanian, seperti Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal). Program ini juga diterapkan di Bengkulu dengan memberikan bantuan pupuk, bibit unggul, alat pertanian, serta pendampingan penyuluh lapangan.⁸⁵

Selain tanaman pangan, komoditas tahunan seperti kopi, karet, dan lada mendapat perhatian besar karena memiliki nilai jual tinggi di pasar domestik maupun internasional. Daerah Rejang Lebong dan Kepahiang dikenal sebagai sentra kopi, sedangkan dataran rendah serta lokasi transmigrasi banyak

⁸⁴ Dedi Irwandi, *Sejarah Bengkulu: Dari Kolonial ke Orde Baru* (Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2010), hlm. 145.

⁸⁵ M. F. Siregar, "Swasembada Beras dan Politik Pangan Orde Baru," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (1994), hlm. 34.

dikembangkan untuk perkebunan karet.⁸⁶ Lada Bengkulu yang memiliki aroma khas bahkan menjadi salah satu komoditas ekspor yang mulai dikenal di pasar luar negeri.⁸⁷ Program ekstensifikasi pertanian juga dilakukan melalui pembukaan lahan baru, terutama di kawasan transmigrasi. Para transmigran asal Jawa memperoleh lahan garapan, rumah, serta sarana dasar lain, sehingga mampu mengolah tanah tidur menjadi lahan produktif. Hal ini mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi baru di pedalaman Bengkulu.⁸⁸

Komitmen Soeprapto dalam mengembangkan sektor pertanian ditunjukkan melalui penetapan Rencana Intensifikasi Padi, Palawija, dan Sayuran Tahun Anggaran 1985/1986, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 192 Tahun 1985. Program ini mengatur jadwal musim tanam April 1985, September 1985, serta Oktober 1985–Maret 1986, dengan ketentuan pokok untuk memperluas dan meningkatkan produktivitas pangan daerah. Seluruh anggota Satuan Pembina dan Pelaksana Bimas diwajibkan bertanggung jawab atas keberhasilan program tersebut.⁸⁹ SK ini memperlihatkan kesungguhan Soeprapto untuk menjadikan

⁸⁶ A. Rohian, *Pertanian Bengkulu dalam Perspektif Sejarah* (Bengkulu: FKIP UNIB, 2002), hlm. 89.

⁸⁷ R. Yulizar, "Komoditas Lada di Bengkulu: Potensi dan Permasalahan," *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Bengkulu*, Vol. 5, No. 1 (2005), hlm. 12–13.

⁸⁸ Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria di Indonesia: Sebuah Kajian Kritis* (Jakarta: Insist Press, 2000), hlm. 102.

⁸⁹ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 192 Tahun 1985 tentang Rencana Intensifikasi Padi, Palawija, dan Sayuran Tahun Anggaran 1985/1986*.

pertanian sebagai basis pembangunan ekonomi daerah sekaligus kontribusi Bengkulu bagi ketahanan pangan nasional.

Meskipun demikian, pengembangan pertanian dan perkebunan di Bengkulu pada era ini menghadapi sejumlah tantangan. Masih banyak petani yang bergantung pada pola tradisional dengan modal terbatas serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar. Ketimpangan penguasaan lahan juga mulai terlihat, terutama dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar di sektor perkebunan karet dan sawit.⁹⁰ Selain itu, pembukaan lahan secara besar-besaran, baik melalui penebangan maupun pembakaran hutan, menimbulkan dampak ekologis berupa erosi, banjir musiman, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.⁹¹

Kendati menghadapi hambatan, kebijakan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di masa Gubernur Soeprapto menjadi fondasi penting bagi transformasi ekonomi Bengkulu. Dari daerah yang sebelumnya terpinggirkan secara geografis dan ekonomi, Bengkulu mulai berperan dalam produksi pangan nasional serta ekspor komoditas perkebunan, meskipun persoalan struktural dan ketimpangan sosial-ekonomi masih memerlukan perhatian di masa berikutnya.

⁹⁰ Sutarto, "Dampak Sosial-Ekonomi Perkebunan Besar di Sumatera Bagian Selatan," *Jurnal Sejarah Sosial Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (1999), hlm. 77.

⁹¹ N. Suprihanto, *Pembangunan dan Lingkungan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 56.

D. Migrasi dan Transmigrasi

Program transmigrasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika sosial-ekonomi Bengkulu pada masa kepemimpinan Gubernur Soeprapto (1978–1989). Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional Orde Baru untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa sekaligus mendistribusikan penduduk ke wilayah-wilayah luar Jawa yang masih memiliki lahan luas namun jarang penduduk.⁹² Sebagai provinsi yang masih muda dan relatif sepi penduduk, Bengkulu menjadi salah satu tujuan utama program ini.

Pelaksanaan program transmigrasi di Bengkulu pada masa Soeprapto tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan nasional dalam REPELITA III (1979–1984) dan REPELITA IV (1984–1989). Pada masa REPELITA III, pemerintah pusat menekankan pengembangan sektor pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi, di mana transmigrasi menjadi sarana penting untuk membuka lahan baru dan memperluas areal pertanian di luar Jawa. Sedangkan pada masa REPELITA IV, arah kebijakan transmigrasi mulai difokuskan pada pemerataan pembangunan daerah dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah transmigrasi.

Selama masa jabatan Soeprapto, ribuan kepala keluarga transmigran terutama dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta ditempatkan di berbagai lokasi transmigrasi di

⁹² Suhadi Mangkusuwondo, *Kebijakan Pembangunan Pertanian Orde Baru* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 72.

Bengkulu, seperti Mukomuko, Seluma, Kaur, Rejang Lebong, dan Bengkulu Utara.⁹³ Para transmigran mendapatkan rumah, lahan pertanian, serta bantuan awal berupa bibit dan peralatan pertanian. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan pedesaan, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.⁹⁴

Dampak ekonomi dari program transmigrasi cukup signifikan. Kehadiran para transmigran memperluas lahan pertanian yang sebelumnya belum digarap serta meningkatkan produktivitas daerah.⁹⁵ Selain itu, transmigran juga menciptakan pasar baru di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang berkembang. Beberapa kawasan transmigrasi kemudian berkembang menjadi desa dan kecamatan baru dengan kehidupan sosial-ekonomi yang lebih dinamis. Para transmigran membawa budaya kerja keras dan pola pertanian intensif yang menjadi contoh bagi masyarakat lokal.⁹⁶

Namun dari sisi sosial, program ini tidak lepas dari tantangan. Interaksi antara masyarakat lokal (Rejang, Serawai, dan Melayu Bengkulu) dengan para pendatang dari Jawa

⁹³ Gunawan Wiradi, *Reformasi Agraria di Indonesia: Sebuah Kajian Kritis* (Jakarta: Insist Press, 2000), hlm. 108.

⁹⁴ A. Rohian, *Pertanian Bengkulu dalam Perspektif Sejarah* (Bengkulu: FKIP UNIB, 2002), hlm. 95.

⁹⁵ Sutarto, "Dampak Sosial-Ekonomi Perkebunan Besar di Sumatera Bagian Selatan," *Jurnal Sejarah Sosial Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (1999), hlm. 81.

⁹⁶ Dedi Irwandi, *Sejarah Bengkulu: Dari Kolonial ke Orde Baru* (Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2010), hlm. 150.

terkadang menimbulkan gesekan, terutama terkait kepemilikan lahan dan distribusi bantuan pemerintah.⁹⁷

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah juga menyadari bahwa transmigrasi tidak cukup hanya dengan penempatan penduduk, tetapi harus diikuti dengan pembangunan sarana penunjang. Hal ini tampak dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 516 Tahun 1985 tentang Penetapan Lokasi Proyek Perintis Pemugaran Perumahan Desa Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, yang menetapkan wilayah Rejang Lebong, Mukomuko, dan Bengkulu Selatan sebagai prioritas.⁹⁸ SK ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pemukiman transmigrasi sekaligus memperkuat integrasi antara transmigran dan masyarakat lokal. Dengan adanya perbaikan perumahan, infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, serta sarana irigasi, wilayah transmigrasi menjadi lebih siap mendukung pembangunan jangka panjang.

Secara keseluruhan, migrasi dan transmigrasi di era Gubernur Soeprapto berperan penting dalam mengubah lanskap demografis, sosial, dan ekonomi Bengkulu. Di satu sisi, program ini memperluas basis ekonomi rakyat melalui pengembangan pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, transmigrasi juga mempercepat proses integrasi wilayah terpencil ke dalam jaringan pembangunan nasional. Meskipun diwarnai sejumlah persoalan

⁹⁷ R. Yulizar, "Komoditas Lada di Bengkulu: Potensi dan Permasalahan," *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Bengkulu*, Vol. 5, No. 1 (2005), hlm. 17.

⁹⁸ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 516 Tahun 1985 tentang Penetapan Lokasi Proyek Perintis Pemugaran Perumahan Desa Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu*.

sosial, kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi proses pembangunan Bengkulu pada dekade-dekade berikutnya.

E. Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam pembangunan jangka panjang. Pada masa kepemimpinan Gubernur Soeprapto, sektor pendidikan dan kesehatan mulai mendapatkan perhatian lebih serius di Bengkulu. Walaupun pembangunan fisik seperti jalan, pelabuhan, dan sarana ekonomi tetap menjadi prioritas utama, pemerintah daerah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur semata, tetapi juga oleh kualitas penduduknya. Oleh karena itu, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk menjangkau wilayah-wilayah pedesaan dan daerah transmigrasi yang sebelumnya kurang terlayani.⁹⁹

Selain berfokus pada swasembada pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan, REPELITA juga memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sosial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah, Pemerintah Daerah Bengkulu di bawah kepemimpinan Soeprapto berupaya mengimplementasikan arah kebijakan tersebut melalui penguatan sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

⁹⁹ A. Rohian, *Pertanian Bengkulu dalam Perspektif Sejarah* (Bengkulu: FKIP UNIB, 2002), hlm. 93.

Di bidang pendidikan, Gubernur Soeprapto turut berkontribusi dalam mengembangkan Universitas Bengkulu diwujudkan melalui perjuangannya yang gigih untuk mendirikan universitas negeri di Bengkulu, mulai dari menggalang dukungan masyarakat, tokoh adat, Pemda Tk. I Bengkulu. Selain itu, Soeprapto juga berhasil mengatasi kendala ketersediaan tenaga edukatif dengan menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada atas petunjuk Presiden Soeharto, yang kemudian mengirimkan dosen-dosen dan tenaga akademik untuk memperkuat fondasi awal UNIB. Hal tersebut dapat dilihat dari rektor pertama dan kedua UNIB yang sebelumnya merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada.¹⁰⁰

Di bidang kesehatan, pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi langkah strategis. Fasilitas ini didirikan di tingkat kecamatan untuk menyediakan layanan dasar, termasuk imunisasi, perawatan ibu dan anak, serta penanganan penyakit umum.¹⁰¹ Program kesehatan ibu dan anak (KIA) digencarkan mengingat tingginya angka kematian ibu dan bayi di Bengkulu pada masa itu. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) juga diperkuat sebagai ujung tombak kesehatan berbasis masyarakat. Walaupun masih menghadapi tantangan minimnya tenaga medis di daerah terpencil, pemerintah daerah

¹⁰⁰ S. Arsyad, *Pendidikan di Bengkulu: Sejarah dan Perkembangannya* (Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2005), hlm. 57.

¹⁰¹ N. Suprihanto, *Pembangunan dan Lingkungan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 69.

berupaya memberi insentif dan tunjangan khusus untuk menarik tenaga kesehatan agar bersedia bertugas di wilayah pedalaman.¹⁰²

Sejumlah kebijakan daerah juga memperkuat pembangunan pendidikan dan kesehatan. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 517 Tahun 1984 mengatur pembangunan tugu dan taman di Lapangan Merdeka dengan nilai Rp221 juta.¹⁰³ Keberadaan taman ini tidak hanya dimaksudkan sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan masyarakat, terutama dalam menciptakan ruang terbuka yang mendukung kegiatan belajar luar kelas dan interaksi sosial.

Selain itu, pemerintah daerah mengembangkan sektor olahraga dan kebugaran masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui SK Gubernur Nomor 552 Tahun 1984 tentang pembentukan Persatuan Olahraga Sekretariat Wilayah (PORSEIWILDA) sebagai pengganti Porseda.¹⁰⁴ Keputusan ini bertujuan untuk memperkuat pembinaan olahraga di tingkat daerah, sekaligus menjadi wadah pengembangan potensi atlet Bengkulu.

Dukungan terhadap sarana rekreasi edukatif juga tampak dalam beberapa kebijakan lain. SK Gubernur Nomor 186 Tahun 1984 menetapkan pembangunan kebun raya sebagai sarana rekreasi dan pendidikan lingkungan.¹⁰⁵ Langkah ini

¹⁰² N. Suprihanto, *Pembangunan dan Lingkungan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 72.

¹⁰³ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Nomor 517 Tahun 1984 tentang Pembuatan Tugu/Taman di Lapangan Merdeka*.

¹⁰⁴ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Nomor 552 Tahun 1984 tentang Pembentukan PORSEIWILDA*.

¹⁰⁵ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 1984 tentang Pembangunan Kebun Raya*.

memperkenalkan masyarakat pada manfaat konservasi sekaligus menjadi laboratorium alam bagi pelajar dan mahasiswa. Kemudian, SK Gubernur Nomor 596 Tahun 1984 menetapkan pembentukan taman safari sebagai ruang rekreasi berbasis edukasi fauna, yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa.¹⁰⁶

Dalam bidang kesehatan, SK Gubernur Nomor 189 Tahun 1985 menetapkan Bupati dan Walikotamadya se-Provinsi Bengkulu sebagai penanggung jawab pelaksanaan bantuan pembangunan kesehatan di wilayah masing-masing.¹⁰⁷ Hal ini menunjukkan adanya desentralisasi tanggung jawab agar pelaksanaan program kesehatan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan daerah.

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga diwujudkan dalam penghargaan bagi keluarga yang berhasil melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Hal ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 586 Tahun 1984.¹⁰⁸ Dengan pemberian penghargaan tersebut, pemerintah berusaha menumbuhkan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengendalian jumlah penduduk sekaligus meningkatkan kualitas keluarga.

¹⁰⁶ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Nomor 596 Tahun 1984 tentang Pembentukan Taman Safari*.

¹⁰⁷ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Nomor 189 Tahun 1985 tentang Penetapan Bupati/Walikotamadya sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kesehatan*.

¹⁰⁸ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Nomor 586 Tahun 1984 tentang Penghargaan bagi Masyarakat Pelaksana KB*.

Peningkatan mutu tenaga kesehatan menjadi perhatian khusus. Melalui SK Gubernur Nomor 567 Tahun 1984, dibentuk Tim Penyeleksi Dokter dan Paramedis Teladan di Provinsi Bengkulu.¹⁰⁹ Tim ini bertugas menilai, memilih, dan mengusulkan dokter serta paramedis terbaik tingkat provinsi untuk kemudian diusulkan ke tingkat nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas dedikasi tenaga kesehatan serta mendorong peningkatan mutu pelayanan medis, terutama di Puskesmas. Namun dikarenakan keterbatasan sumber membuat penulis belum dapat memastikan apakah ada nama dokter yang akhirnya dipilih pada tingkat nasional.

Secara keseluruhan, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan pada masa Gubernur Soeprapto menunjukkan adanya perubahan positif dalam kualitas hidup masyarakat Bengkulu. Meningkatnya angka partisipasi sekolah, menurunnya beberapa penyakit menular, serta berkembangnya sarana rekreasi-edukasi menjadi bukti bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan.¹¹⁰

Jika dikaitkan dengan teori dinamika sosial dan ekonomi, kebijakan ini mencerminkan proses perubahan sosial yang bersifat progresif, di mana masyarakat Bengkulu mulai mengalami peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan,

¹⁰⁹ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Surat Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 1984 tentang Tim Penyeleksi Dokter dan Paramedis Teladan*.

¹¹⁰ Dedi Irwandi, *Sejarah Bengkulu: Dari Kolonial ke Orde Baru* (Bengkulu: Universitas Bengkulu Press, 2010), hlm. 155.

kesehatan, dan kesejahteraan keluarga sebagai modal sosial untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dinamika sosial tampak melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal, munculnya tenaga akademik lokal hasil kerja sama dengan universitas besar seperti UGM, serta terbentuknya perilaku baru dalam menjaga kesehatan melalui program Puskesmas, Posyandu, dan Keluarga Berencana (KB).

Secara ekonomi, pembangunan sumber daya manusia pada masa Soeprapto juga memperlihatkan keterkaitan erat antara peningkatan kualitas penduduk dan produktivitas daerah. Pembangunan Universitas Bengkulu, fasilitas kesehatan, serta sarana olahraga dan rekreasi edukatif seperti kebun raya dan taman safari menjadi bagian dari strategi pembangunan yang tidak hanya menyiapkan tenaga kerja terdidik, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori dinamika ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas manusianya yang menjadi pelaku utama kegiatan produksi dan inovasi. Dengan demikian, kebijakan Soeprapto dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak hanya memperkuat aspek sosial masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai katalis bagi perubahan ekonomi jangka panjang yang lebih mandiri dan berkelanjutan di Bengkulu.

F. Dinamika Politik Lokal

Secara politik, masa pemerintahan Gubernur Soeprapto ditandai dengan stabilitas yang relatif tinggi akibat dominasi Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik utama pada masa

Orde Baru. Stabilitas ini membuat dinamika politik di Bengkulu terlihat terkendali, meskipun sesungguhnya di tingkat lokal tetap muncul sejumlah persoalan, terutama terkait dengan respons masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang belum merata. Ketimpangan antara wilayah kota dan desa, serta antara penduduk lokal dan transmigran, menjadi salah satu isu yang sesekali menimbulkan ketegangan sosial. Namun demikian, kebijakan yang tetap mengakomodasi sebagian nilai budaya lokal membantu menjaga harmoni di tengah perubahan sosial-ekonomi yang berlangsung pesat pada saat itu.¹¹¹

Dinamika politik Bengkulu pada masa ini tidak dapat dilepaskan dari konteks nasional yang sentralistik. Pemerintahan Orde Baru menekankan stabilitas politik sebagai prioritas utama, sehingga ruang partisipasi politik masyarakat sangat terbatas. Gubernur di daerah berperan sebagai representasi pemerintah pusat yang bertugas memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arahan tanpa ada hambatan politik lokal. Dengan demikian, praktik politik di Bengkulu pada era Soeprapto cenderung “seragam” dan terkendali, mengikuti garis kebijakan pusat.¹¹²

Golkar memainkan peran hegemonik dalam struktur politik Bengkulu. Hampir semua jabatan penting dalam pemerintahan daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di

¹¹¹ Leo Agustino, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 87.

¹¹² Haryanto, *Orde Baru dan Politik Lokal: Kontrol Pusat terhadap Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 45.

DPRD, ditempati oleh kader atau simpatisan Golkar. Dalam setiap pemilu, kemenangan Golkar sudah dapat diprediksi, sebab didukung oleh birokrasi, aparat militer (ABRI), serta jaringan administratif negara. Sementara itu, keberadaan partai lain seperti PPP dan PDI lebih bersifat formalitas dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan politik lokal.¹¹³

Walaupun terlihat stabil, ketegangan politik tetap sesekali muncul. Keluhan mengenai dominasi pejabat luar daerah, terutama dari kalangan militer atau birokrat pusat, sering kali menimbulkan perasaan keterasingan di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, isu ketimpangan pembangunan antar daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Minimnya representasi kelompok adat dan minoritas dalam struktur pemerintahan memperkuat kesan bahwa kebijakan daerah belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan masyarakat asli Bengkulu.¹¹⁴

Meski menghadapi berbagai tantangan, secara keseluruhan era kepemimpinan Soeprapto tetap ditandai oleh stabilitas politik yang tinggi. Kondisi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Aparat keamanan berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, sementara tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat

¹¹³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 132.

¹¹⁴ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 215.

tetap dilibatkan secara informal meskipun tidak memiliki posisi formal dalam struktur pemerintahan.¹¹⁵



¹¹⁵ R. William Liddle, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 63.